

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2017

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

PONTIANAK

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja menjadi kewajiban bagi semua instansi pemerintah, termasuk BPTP Pontianak dalam mempertanggung jawabkan anggaran dan kegiatan yang telah dikelola selama satu tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LAKIN merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan LAKIN Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPTP Pontianak pada tahun berikutnya. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPTP Pontianak dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2. Organisasi

1.2.1. Kedudukan dan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, yang melaksanakan fungsi pelayanan teknis di bidang proteksi tanaman perkebunan. BPTP Pontianak memiliki perangkat pendukung yang memadai. Kegiatan operasional bidang proteksi baik di laboratorium maupun di lapangan dilaksanakan oleh tenaga teknis yang handal di bidangnya. Kegiatan BPTP Pontianak bersinggungan langsung dengan petani perkebunan melalui petugas

ujung tombak yang ada di lapangan yaitu Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman (UPPT) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dasar organisasi BPTP Pontianak adalah Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 11/Permentan/OT.210/02/ 2008 Tanggal 6 Pebruari 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dan Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 72/Kpts/OT.140/4/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Organisasi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak memiliki 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pelayanan Teknik, Seksi Data dan Informasi, Seksi Jaringan Laboratorium, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

BPTP Pontianak memiliki Tugas Pokok: Melaksanakan Analisis Teknis Dan Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan;
2. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhinya;
3. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhinya;
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyak dan pelaporan agensia hayati OPT perkebunan;
5. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknis pengendalian OPT perkebunan;
6. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan;

7. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agensia hayati OPT perkebunan;
8. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
9. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
10. Pemberian pelayanan teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
11. Pengelolaan data dan dokumentasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi perkebunan.
12. Pelaksanaan pengembangan jaringan data kerjasama laboratorium.
13. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.

1.2.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a) Menurut Golongan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPTP Pontianak Tahun 2017 Berdasar Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5 Orang
2	III	41Orang
3	II	32Orang
4	I	0 Orang
Jumlah Seluruh Pegawai		78 Orang

b) Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPTP Pontianak Tahun 2017 berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0 Orang
2	SLP	0 Orang
3	SLTA	18 Orang
4	D1	26 Orang
5	D3/Sarjana Muda	5 Orang
6	D4	2 Orang
7	S1	23 Orang
8	S2	4 Orang
Jumlah Seluruhnya		78 Orang

Keseluruhan pegawai BPTP terdiri dari PNS Pusat berjumlah 78 orang, PNS Daerah/petugas kabupaten yang diperbantukan ke BPTP 1 orang, pegawai kontrak sebanyak 6 orang sehingga total berjumlah 85 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di kota Pontianak (BPTP) sebanyak 46 orang (40 PNS dan 6 tenaga kontrak), dan 39 orang sisanya adalah petugas Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman (UPPT) di 34 Kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat, dengan rincian: (a) Kab. Mempawah sebanyak 7 orang; (b) Kabupaten Kubu Raya 5 orang; (c) Kabupaten Landak 2 orang; (d) Kabupaten Bengkayang 6 orang; (e) Kota Singkawang 1 orang; (f) Kabupaten Sambas 2 orang; (g) Kabupaten Sanggau 7 orang; (h) Kabupaten Sekadau 1 orang; (i) Kabupaten Sintang 3 orang; (j) Kabupaten Kapuas Hulu 1 orang; (k) Kabupaten Kayong Utara 1 orang dan; (m) Kabupaten Ketapang 3 orang.

1.2.4. Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan utama (*strategic issued*) organisasi BPTP Pontianak adalah semakin berkurangnya jumlah pegawai khususnya tenaga teknis. Penambahan tenaga teknis UPPT diperlukan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan tanaman perkebunan di daerah. Saat ini jumlah tenaga teknis di UPPT sebagian besar hanya berjumlah 1 (satu) orang dengan umur yang mendekati atau masuk masa usia pensiun sedangkan wilayah binaan meliputi 2-12 kecamatan per UPPT. Kekurangan pegawai (tenaga teknis) sebenarnya sudah dirasakan sejak tahun 2013 karena beberapa orang telah memasuki masa usia pensiun. Sampai dengan tahun 2017, ada beberapa UPPT yang kosong/tidak operasional karena Petugas UPPT nya telah memasuki masa pensiun seperti UPPT Bengkayang.

Kekosongan petugas UPPT selain disebabkan petugas memasuki masa usia pensiun, juga disebabkan oleh ditariknya pegawai Dinas Daerah ke instansi induknya. UPPT yang tidak ada Petugasnya sampai dengan akhir tahun 2017 meliputi UPPT Pemangkat, UPPT Nanga Pinoh, UPPT Nanga Tayap dan UPPT Bengkayang.

Jumlah areal tanaman perkebunan yang cukup luas di masing-masing wilayah binaan UPPT belum tercover seluruhnya dengan intensif oleh petugas yang ada. Pada tahun 2015 rekrutment PNS dari Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, BPTP Pontianak mendapatkan 5 (lima) CPNS yang terdiri dari 1 (satu) orang S1 jurusan Hama Penyakit Tanaman (HPT); 1 (satu) orang S1 jurusan Biologi dan 3 (tiga) orang D3 Analis Kimia dan sekarang ditugaskan sebagai Analis dan Pranata/Pengelola Laboratorium di Laboratorium BPTP Pontianak. Dengan adanya tambahan petugas, penanganan tugas di semua Laboratorium BPTP Pontianak dapat tertangani dengan baik. Keperluan yang sangat mendesak adalah Petugas UPPT untuk mengisi Kantor UPPT di 1 (satu) kota dan 12 (dua belas) kabupaten.

Petugas teknis perlindungan perkebunan pada BPTP Pontianak rata-rata berumur di atas 53 tahun dan sampai saat ini masih kurang adanya regenerasi petugas lapangan (Petugas UPPT) dengan

tidak adanya tambahan tenaga CPNS pada BPTP Pontianak sebagai petugas UPPT, maka saat ini dirasakan tidak adanya petugas pengganti yang akan meneruskan tugas dan fungsi pada bidang perlindungan perkebunan.

Saat ini BPTP Pontianak memiliki 3 (tiga) orang calon Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang sudah mendapat pendidikan Diklat Dasar pada TA. 2008. Namun sampai sekarang belum dapat diusulkan sebagai Jabatan Fungsional PBT sehubungan dengan status BPTP Pontianak yang sampai saat ini masih menangani bidang perlindungan perkebunan dan belum menangani bidang perbenihan tanaman perkebunan. Sehubungan dengan hal tersebut peningkatan status Balai ke depan yang dalam tugas dan fungsinya menangani selain bidang perlindungan juga bidang perbenihan dapat diupayakan untuk dilanjutkan.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi BPTP Pontianak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan, BPTP Pontianak pada tahun 2017 menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Kegiatan tersebut sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BPTP Pontianak. Memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan Visi BPTP Pontianak yaitu: *“Menjadi Instansi Yang Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan”*.

2.1.2. Misi BPTP Pontianak

Untuk mencapai Visi tersebut di atas , maka Misi BPTP Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan Yang Berwawasan Lingkungan
- b. Meningkatkan Pelayanan Analisis Perlindungan Perkebunan Kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Perkebunan
- c. Memperkuat Sistem Informasi Perlindungan Perkebunan (SIMPP)
- d. Penegakan Hukum Di Bidang Perlindungan Perkebunan

2.1.3. Tujuan

- a. Meningkatkan pengembangan teknologi terapan perlindungan perkebunan;
- b. Meningkatkan pengembangan teknologi agensia pengendali hayati dan pestisida nabati;

- c. Meningkatkan fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) perkebunan serta gangguan usaha perkebunan;
- d. Meningkatkan pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
- e. Meningkatkan pengembangan jaringan laboratorium;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM perlindungan perkebunan;
- g. Meningkatkan kemampuan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan keuangan

2.1.4. Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, BPTP Pontianak menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai pada periode 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis BPTP Pontianak Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya pengembangan Teknologi Terapan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Terwujudnya Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	- Jumlah Teknologi Terapan Perlindungan Tanaman Perkebunan - Pembangunan kebun contoh, demplot , uji koleksi (Ha)

2.1.5. Arah Kebijakan

BPTP Pontianak menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan tanaman perkebunan dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu (PHT).
- b. Pelaksanaan PHT merupakan tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.
 - Masyarakat melakukan pengendalian di kebunnya.
 - Pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat dan memberikan bantuan terbatas dalam penanggulangan “eksplosi”.
- c. Perlindungan tanaman perkebunan dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan dan masa pasca panen
- d. Perlindungan tanaman perkebunan dilaksanakan melalui tindakan:
 - Pecegahan masuk dan tersebarnya OPT dari suatu area ke area lain
 - Pengendalian OPT
 - Eradikasi OPT

2.1.6. Program Kegiatan

Program Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2017 adalah melaksanakan kegiatan untuk Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan, dan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan.

2.1.7. Fokus Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2017

1. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.
2. Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi dll.
3. Rakitan Teknologi Spesifik Proteksi Tanaman Perkebunan.
4. Pemanfaatan Agensia Hayati.

5. Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.
6. Layanan Perkantoran.
7. Peralatan dan fasilitas perkantoran.

2.1.8. Strategi

Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2014 – 2019, strategi BPTP Pontianak tahun 2014-2019 ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai sasaran terlaksananya kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan yaitu :
 - a. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana tepat waktu.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
 - c. Mengoptimalkan peran petugas pendamping.
 - d. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pelatihan sistem pertanian organik, pendampingan dan praasesmen.
2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pengembangan perakitan teknologi perlindungan perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah, kualitas dan capaian hasil perakitan teknologi perlindungan tanaman yang spesifik lokasi sesuai kebutuhan petani/pekebun.
 - b. Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi antara kegiatan uji perakitan teknologi dan deseminasi.
 - c. Meningkatkan ketersediaan data dan hasil-hasil pengujian yang dapat diakses oleh pengguna/petani.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan BBPPTP, Ballit, Puslit dan perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan uji coba perakitan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

3. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pengembangan teknologi pengendalian hayati dan pestisida nabati, yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah dan kualitas pengembangan teknologi eksplorasi musuh alami dan pestisida nabati.
 - b. Meningkatkan fokus, prioritas, jumlah dan kualitas pengembangan teknologi perbanyakkan, formulasi dan aplikasi agensia hayati dan pestisida nabati.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan BBPPTP, Ballit, Puslit dan perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan teknologi pengendalian hayati
4. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan (GUP), yaitu :
 - a. Meningkatkan fokus, prioritas dan kualitas metode pengamatan, monitoring, surveilans dan peramalan OPT
 - b. Meningkatkan fokus, prioritas dan kualitas metode monitoring dan penanganan GUP
 - c. Meningkatkan akurasi dan ketersediaan data OPT dan GUP yang dapat di akses oleh pengguna.
5. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan informasi perlindungan tanaman perkebunan, yaitu :
 - a. Meningkatkan pengembangan teknologi informasi perlindungan perkebunan
 - b. Meningkatkan pengembangan dan penyebaran media informasi perlindungan perkebunan
 - c. Meningkatkan ketersediaan jumlah dan kualitas bahan/media informasi yang dapat diakses oleh pengguna
6. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pengembangan jaringan laboratorium, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium

- b. Meningkatkan penerapan sistem mutu dan manajemen laboratorium
 - c. Menambah ruang lingkup akreditasi laboratorium.
 - d. Meningkatkan kerjasama jaringan laboratorium dengan BBPPTP.
7. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kemampuan SDM perlindungan perkebunan, yaitu :
- a. Meningkatkan jenjang pendidikan formal (S1, S2, dan S3) bagi Petugas BPTP.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas melalui pelatihan/seminar/ simposium/workshop/studi banding dan magang.
 - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pusat, regional dan daerah melalui pertemuan teknis, pertemuan koordinasi atau pertemuan konsultasi dan pembinaan teknis regional.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2017

2.2.1. Program Dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2017

Mengacu pada hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2016 adalah *“Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”*. Fokus kegiatan pembangunan perkebunan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah *Dukungan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan*. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program peningkatan produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

2.2.2. Sasaran Program Dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2017

Sasaran yang hendak dicapai Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak dalam periode 2017 sesuai dengan tugas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya pengembangan perakitan teknologi proteksi tanaman perkebunan.
2. Meningkatnya pengembangan teknologi pengendalian hayati dan pestisida nabati.
3. Meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT serta gangguan usaha perkebunan.
4. Meningkatnya pelayanan informasi proteksi tanaman perkebunan.
5. Meningkatnya pengembangan jaringan laboratorium.
6. Meningkatnya kemampuan SDM proteksi perkebunan.
7. Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.

2.2.3. Tujuan Program Dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2017

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPTP Pontianak dalam rangka pencapaian program perkebunan merupakan cerminan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlindungan adalah *Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan*.

Komponen Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 adalah :

1. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

Komponen kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 adalah :

1. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
 - a. Perakitan teknologi perlindungan tanaman perkebunan spesifik lokasi.
 - b. Pengembangan Teknologi Agensia Pengendali Hayati (APH) dan Pestisida Nabati (Pesnab).
2. Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas.
 - a. Pembinaan Petugas UPPT.
 - b. Konsultasi Teknis Regional Kalimantan.
 - c. Bimbingan Teknis dan Pengembangan Jabatan Fungsional POPT Perkebunan.
3. Fasilitasi Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan.
 - a. Pengawasan identifikasi OPT utama tanaman perkebunan.
4. Fasilitasi Gangguan Usaha Perkebunan Non OPT (dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun).
 - a. Fasilitasi pemantauan kebakaran dan dampak fenomena iklim.
5. Pemantapan Kelembagaan Perlindungan.
 - a. Operasional Laboratorium OPT, BPT, Laboratorium APH, dan Sub Laboratorium.
 - b. Pengembangan Jejaring Laboratorium.
 - c. Administrasi Kegiatan.
6. Pemantapan Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Perkebunan (SIMPP)
 - a. Pembuatan publikasi dan informasi perlindungan perkebunan (buku, leaflet, poster dan peta).
 - b. Pemanfaatan Web Site Perlindungan Perkebunan
7. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan
 - a. Akreditasi Laboratorium.
 - b. Penyediaan alat laboratorium

2.2.4. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2017

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) BPTP Pontianak merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala BPTP Pontianak untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki, dan memuat pernyataan kesanggupan pencapaian kinerja BPTP Pontianak, dengan mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran yang tersedia.

Mengacu pada renstra 2014 – 2019, untuk melaksanakan program Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, BPTP Pontianak menyusun dokumen Penetapan Kinerja dengan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Penetapan Kinerja BPTP Pontianak Tahun 2017

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	1. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan	11 Paket teknologi
		2. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan	7 jenis
		3. Fasilitasi teknis dukungan teknologi proteksi tanaman perkebunan	12 bulan
2.	Menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam, dampak perubahan iklim dan gangguan/konflik usaha perkebunan	1. Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan	6 desa

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi yang merupakan gambaran kinerja BPTP Pontianak Tahun 2017 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2017, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2017) dengan tahun lalu (2016). Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tahun 2017 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode skoring, yaitu (1) Sangat Berhasil (capaian >100%); (2) Berhasil (capaian 80-100%); (3) Cukup Berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan.

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Program

Program tahun 2017 adalah Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan dukungan anggaran/DIPA sebesar RP. 11.224.086.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Pagu anggaran BPTP Pontianak untuk tahun anggaran 2017 terjadi penurunan sebesar Rp. 3.286.349.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) bila dibandingkan pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 14.537.045.000,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sampai dengan akhir tahun 2017. Total serapan anggaran BPTP Pontianak mencapai **89,95%** dari total anggaran. Berdasarkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut di atas maka pencapaian sasaran program BPTP termasuk dalam katagori ***berhasil***.



Gambar 1. Pengukuran Capaian Program Berdasarkan Serapan Anggaran BPTP Pontianak Tahun 2016 dan 2017

3.1.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan

Capaian sasaran kegiatan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Tahun Anggaran 2017 seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan BPTP Pontianak Tahun 2017

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	Dukungan Perlindungan Perkebunan	710.760.000	689.162.800	96,96
2.	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	10.513.326.000	9.407.052.725	89,48
Total		11.224.086.000	10.096.215.525	89,95



Gambar 2. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Pembangunan Perkebunan

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis

Evaluasi kinerja terhadap capaian sasaran program secara keseluruhan dapat dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2017 yaitu mencapai Rp. 10.096.215.525,- dari total anggaran sebesar Rp. 11.224.086.000,- atau mencapai 89,95% dengan capaian fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 92,46%.

3.2.2. Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

Evaluasi terhadap perjanjian kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut : untuk indikator Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan terealisasi 100%. Untuk indikator Eksplorasi, pemanfaatan, penghembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan terealisasi 100%. Untuk indikator Fasilitasi teknis dukungan teknologi proteksi tanaman perkebunan terealisasi 100%. Untuk indikator Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian

organik berbasis komoditas perkebunan terealisasi 100%. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Perjanjian Kinerja (%)
1.	Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan	11 Paket teknologi	11 Paket teknologi	100
2.	Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan	7 jenis	7 jenis	100
3.	Fasilitasi teknis dukungan teknologi proteksi tanaman perkebunan	12 bulan	12 bulan	100
4.	Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan	6 desa	6 desa	100

3.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Output Kegiatan

Hasil evaluasi terhadap pencapaian output kegiatan BPTP Pontianak yaitu terwujudnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Output yang termasuk dalam kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan. Sub outputnya meliputi pelaksanaan dan pembinaan serta sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan. Komponen kegiatan dalam output ini meliputi :

- a. Pelatihan Sistem Pertanian Organik.
- b. Pendampingan Persiapan Sertifikasi Organik.
- c. Pra Asesmen.

Pagu anggaran untuk Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan sebesar Rp. 710.760.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi dana sebesar Rp. 689.162.800,- (96,96%) dan realisasi fisik kegiatan sebesar 97,72%. Terdapat efisiensi pada belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada kelompok tani dan pada kegiatan pelatihan sistem pertanian organik, pendampingan serta pra asesmen.

2. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan.

Output yang termasuk dalam kegiatan ini adalah :

A. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

dengan komponen kegiatan meliputi :

- a. Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan dan Perstisida Nabati di Tanah Asset BPTP Pontianak;
- b. Monitoring dan Pelaporan Sebaran Serangan OPT Penting Perkebunan;
- c. Demplot Pengendalian OPT Spesifik Lokasi;
- d. Pembentukan dan Pelatihan Regu Proteksi Kelompok Tani;
- e. Pengawasan Regu Proteksi.

B. Pengembangan dan Pemanfaatan Agensia Pengendali Hayati Tanaman Perkebunan, dengan komponen kegiatan meliputi :

- a. Perbanyak dan Penyebaran Agensia Hayati oleh Petugas APH BPTP Pontianak;
- b. Perbanyak dan Penyebaran Agensia Hayati oleh Petugas UPPT Parindu;
- c. Uji Pemanfaatan Metabolit Sekunder *Trichoderma* sp untuk Pengendalian Penyakit Tanaman Perkebunan;
- d. Uji Eksplorasi *Bacillus* sp sebagai Agensia Hayati OPT Perkebunan.

C. Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan, dengan komponen kegiatan meliputi :

- a. Karakteristik dan Kajian Bio Kimia *Pseudomonas fluorescens* Spesifik Lokasi Kalbar;
- b. Uji Teknologi PHT Untuk Pengendalian Penyakit Ganggang Pirang pada Tanaman Lada;
- c. Uji Teknologi PHT Pengendalian Hama Kumbang Janur Kelapa;
- d. Uji Lapang Toksisitas Kitosan untuk Pengendalian OPT;
- e. Penyusunan Bahan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan;
- f. Website;
- g. Pameran, Visualisasi Proteksi Tanaman Perkebunan;
- h. Uji Efikasi Metabolit Sekunder Jamur *Beauveria bassiana* terhadap Hama Penggerek Buah Kopi;
- i. Uji Pemanfaatan Jamur Antagonis dan Tanaman Penutup Tanah untuk Pengendalian Jamur Patogen pada Tanaman Lada.

Pagu anggaran untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar Rp. 484.046.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi dana sebesar Rp. 443.106.885,- (91,54%) dan realisasi fisik kegiatan sebesar 93,66%. Terdapat efisiensi pada belanja bahan dan belanja perjalanan biasa.

3. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan, Komponen yang termasuk dalam output ini meliputi:

- a. Akreditasi Laboratorium;
- b. Uji Banding Laboratorium Penguji BPTP Pontianak;
- c. Operasional Laboratorium Penguji BPTP Pontianak;

- d. Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Pestisida di Wilayah Binaan;
- e. Pelatihan Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi;
- f. Pertemuan Teknis Perlindungan Perkebunan untuk Petugas;
- g. Koordinasi Teknis Petugas Perlindungan Perkebunan Region Kalimantan;
- h. Optimalisasi Pelayanan Klinik;
- i. CP/CL Pengembangan Pangan Lahan Perkebunan, Pembinaan dan Koordinasi;
- j. Penggunaan dana PNBPN.

Pagu anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar Rp. 679.749.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi dana sebesar Rp. 613.751.338,- (90,29%) dan realisasi fisik kegiatan sebesar 92,72%. Terdapat efisiensi pada belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, serta belanja jasa profesi.

4. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Komponen kegiatan yang termasuk dalam output ini adalah :

- A. Penyusunan Rencana Anggaran meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satker BPTP Pontianak;
 - b. Pertemuan Penyusunan RKAKL Wilayah Timur Pagu Anggaran Tahun 2018.
- B. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi meliputi :
 - a. Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Operasional Satuan Pengendali Internal (SPI).
- C. Pengelolaan Keuangan meliputi :
 - a. Operasional Sistem Instansi (SAI);
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

- D. Pengelolaan Kepegawaian meliputi :
- a. Magang Petugas di Puslit, Balit, Perguruan Tinggi dll;
 - b. Administrasi Kepegawaian;
 - c. Operasional Sistem Kepegawaian;
 - d. Dalam Rangka Pertemuan;
 - e. Dalam Rangka Pembinaan Teknis Regional Kalimantan.

Pagu anggaran untuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar Rp. 1.053.340.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi dana sebesar Rp. 907.345.559,- (86,14%) dan realisasi fisik kegiatan sebesar 89,60%. Terdapat efisiensi pada belanja perjalanan biasa, belanja bahan, serta belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

5. Layanan Internal

Komponen kegiatan yang termasuk dalam output ini adalah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Pagu anggaran untuk kegiatan Layanan Internal sebesar Rp. 755.420.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi dana sebesar Rp. 710.926.000,- (94,11%) dan realisasi fisik kegiatan sebesar 95,58%. Terdapat efisiensi pada belanja modal peralatan dan mesin, pengadaan kendaraan motor roda dua, pengadaan inventaris asrama, serta pengadaan pakaian kerja pegawai BPTP Pontianak.

6. Layanan Perkantoran

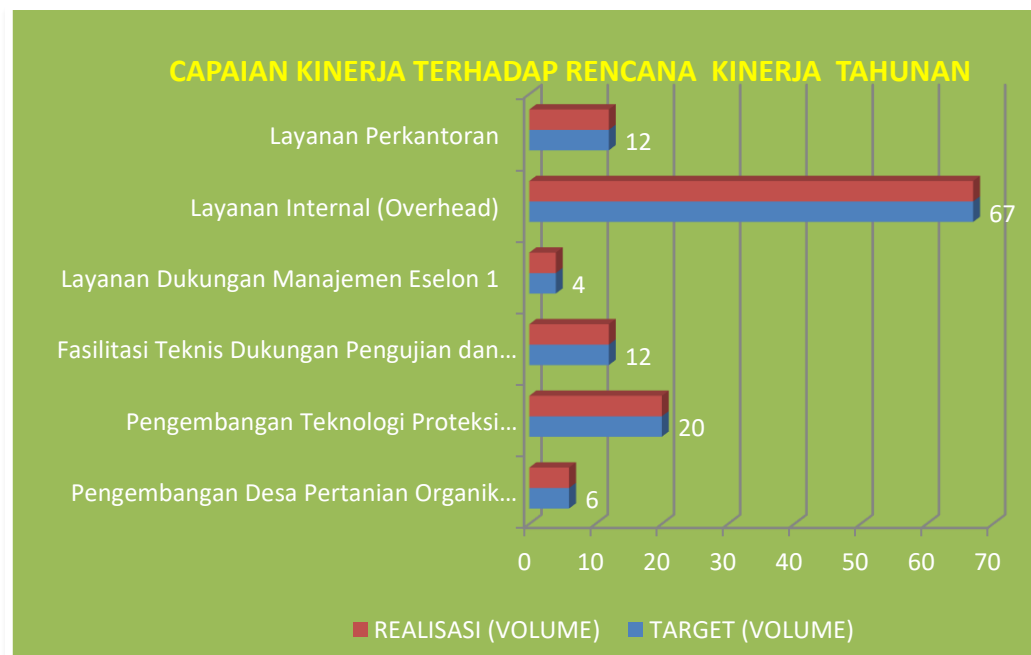
Komponen kegiatan yang termasuk dalam output ini adalah gaji dan tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pemeliharaan kendaraan operasional BPTP Pontianak, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, layanan daya dan jasa, honorarium pengelola Satker, serta administrasi keuangan).

Pagu anggaran untuk kegiatan Layanan Perkantoran sebesar Rp. 7.540.771.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran

terrealisasi dana sebesar Rp. 6.731.922.943,- (89,27%) dan realisasi fisik kegiatan sebesar 91,96%. Terdapat sisa dana sebesar Rp. 808.848.057,- yaitu dari komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan, langganan daya dan jasa, dan administrasi keuangan. Besarnya sisa dana yang tidak terealisasi khususnya pada komponen pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan pada tahun anggaran 2017 terdapat 5 pegawai BPTP yang berakhir masa tugasnya (pensiun) dan tidak ada penambahan pegawai baru.

3.2.4. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan

Capaian kinerja Satker Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak terhadap Rencana Kinerja Tahun 2017 seperti terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Capaian Kinerja Satker Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Terhadap Rencana Kinerja Tahunan

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi seluruh anggaran Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan per 31 Desember 2016

Program	Output	Keuangan			fisik
		Pagu	Realisasi	%	%
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Desa Organik Berbasis Perkebunan (1779.003)	1.946.060.000	1.653.944.500	84,99	100
	Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (1781.002)	1.211.161.000	902.380.500	74,51	87,71
	Fasilitasi Teknologi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (1781.003)	1.962.592.000	1.435.570.166	73,15	81,45
	Layanan Perkantoran (1781.994)	7.428.002.000	6.948.389.990	93,54	96,45
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (1781.997)	1.989.230.000	1.762.328.429	88,59	92,23
	Total	14.537.045.000	12.702.613.585	87,38	91,57

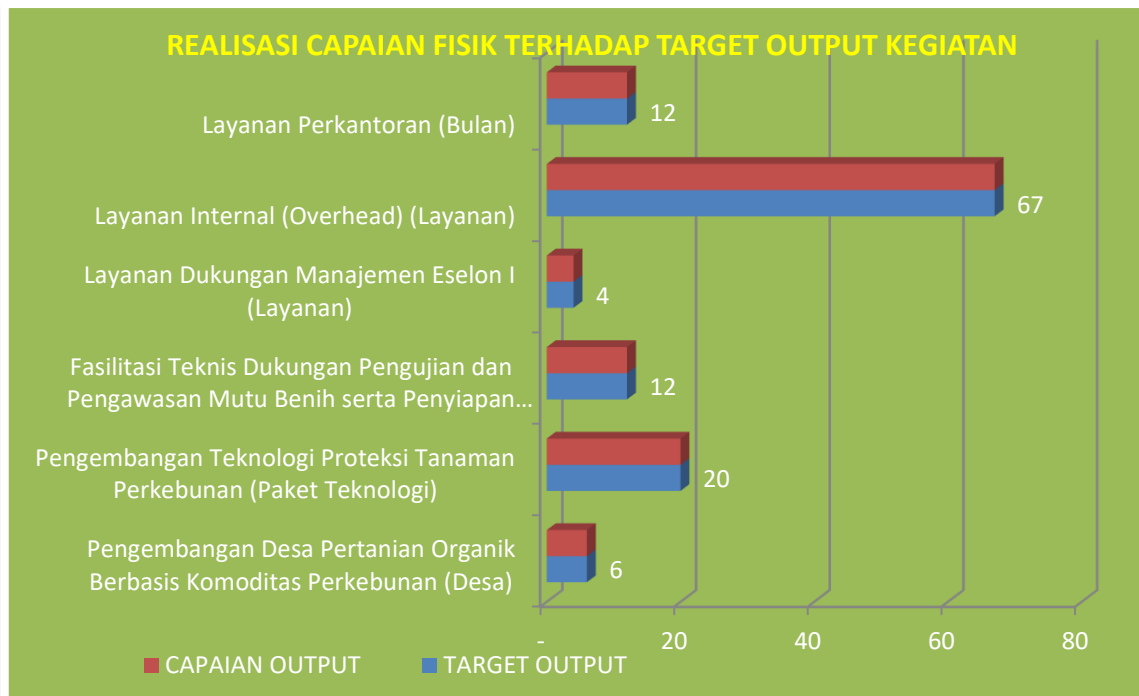
Tabel 8. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan per 31 Desember 2017

Program	Output	Keuangan			fisik
		Pagu	Realisasi	%	%
Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Perkebunan (1779.003)	710.760.000	689.162.800	96,96	97,72
	Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (1781.002)	484.046.000	443.106.885	91,54	93,66
	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (1781.003)	679.749.000	613.751.338	90,29	92,72
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (1781.950)	1.053.340.000	907.345.559	86,14	89,60
	Layanan Internal (Overhead) (1781.951)	755.420.000	710.926.000	94,11	95,58
	Layanan Perkantoran (1781.994)	7.540.771.000	6.731.922.943	89,27	91,96
	Total	11.224.086.000	10.096.215.525	89,95	92,46



Gambar 4. Akuntabilitas terhadap Target Serapan Satker Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun Anggaran 2017

3.3.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik



Gambar 5. Realisasi Capaian Fisik Terhadap Target Output Kegiatan

3.4. Permasalahan, Upaya Penyelesaian dan Rencana Aksi

3.4.1. Permasalahan, Hambatan dan Kendala

3.4.1.1. Administrasi

- 1) Adanya perubahan Nomenklatur SKPD/penggabungan Dinas di tingkat kabupaten berimplikasi pada kurang terfasilitasinya peran perkebunan khususnya kegiatan perlindungan tanaman di tingkat kabupaten
- 2) SDM yang menangani kegiatan perlindungan tanaman di tingkat kabupaten umumnya pegawai baru sehingga belum menguasai penuh seluk beluk perlindungan tanaman

3.4.1.2. Teknis

1. Peran serta pelaku utama perkebunan (petani) dalam kegiatan perlindungan tanaman di kebunnya sendiri dirasa masih kurang
2. Petugas Pengamatan OPT di tingkat lapang jumlahnya jauh berkurang (memasuki masa purna tugas), hal ini berakibat pada minimnya areal perkebunan yang mampu terpantau
3. Kondisi sarana transportasi/infrastruktur di beberapa wilayah kerja di Kalimantan Barat belum memadai, sehingga kegiatan teknis pembinaan petani belum mampu menjangkau semua wilayah kerja

3.4.2. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mempercepat serapan anggaran dan pencapaian fisik kegiatan, telah disusun upaya tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi sebagai berikut :

3.4.2.1. Administrasi

- 1) Meningkatkan koordinasi melalui kegiatan Pertemuan Regional, konsultasi ke SKPD yang membidangi Perkebunan serta upaya lainnya sehingga diperoleh sinergitas persepsi tentang

perlindungan antar instansi yang mebidangi perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota

- 2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas perlindungan yang ada di tingkat kabupaten melalui Bimbingan Teknis Untuk Petugas Perlindungan Perkebunan di BPTP Pontianak

3.4.2.2. Teknis

- 1) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan peran serta pelaku utama perkebunan (petani) dalam melakukan pengamatan perkembangan OPT di kebunnya sendiri melalui kegiatan Demplot Pengendalian OPT, Penumbuhan Kawasan Organik dan Siaga OPT, Pembentukan dan Pelatihan Regu Proteksi Kelompok Tani, Sosialisasi dan pendampingan langsung oleh petugas UPPT
- 2) Mengusulkan ke Bagian Kepegawaian Kementerian Pertanian *via* Ditjenbun untuk dilakukan penambahan pegawai baru khususnya pegawai teknis POPT
- 3) Memfasilitasi petugas pengamat OPT (UPPT) dengan sarana transportasi yang memadai sehingga mampu menjangkau wilayah pengamatan yang lebih luas

3.4.3. Rencana Aksi Tahun 2018

Rencana aksi BPTP Pontianak di Tahun 2018 lebih Fokus pada kegiatan :

- 1) Pencapaian target kinerja seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- 2) Peningkatan akuntabilitas keuangan terhadap realisasi keuangan dan capaian fisik dengan mengedepankan aspek manfaat.

IV. PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Kinerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak selama Tahun 2017 tercermin dalam Laporan Kinerja (LAKIN) yang tentunya telah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi ini dapat terlihat dari akuntabilitas kinerja yaitu capaian kinerja organisasi dan realisasi keuangan diakhir tahun anggaran 2017.

4.1. Kesimpulan

Secara umum, capaian kinerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2017 terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan menunjukkan tingkat capaian sebesar 89,95% untuk realisasi keuangan sedangkan rata-rata realisasi fisik mencapai 92,46% yang berarti kinerja tergolong berhasil karena target-target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja hampir tercapai secara maksimal.

4.2. Langkah-langkah Perbaikan

Laporan kinerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BPTP Pontianak Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan merupakan salah satu sistem penilaian yang aspiratif dalam menentukan kinerja suatu instansi. Untuk meningkatkan kinerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

Pontianak di masa mendatang ada beberapa langkah yang akan diimplementasikan yaitu :

1. Di awal tahun anggaran mengoptimalkan kinerja Tim SPI dan bagian yang terkait lainnya khususnya dalam melakukan telaah awal atas Petunjuk Operasional Kerja (POK) Satker BPTP Pontianak. Dengan dilakukan telaah awal atas POK, akan dapat diprediksi secara dini terhadap kegiatan dan output kegiatan mana yang dapat dilaksanakan tanpa hambatan atau perlu dilakukan revisi.
2. Untuk percepatan penyerapan anggaran, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, akan mengoptimalkan kinerja Tim SPI dan Tim Monev terutama dalam memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan baik administrasi maupun teknis di lapangan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dengan *stakeholder* terkait baik di lingkup Provinsi Kalimantan Barat maupun Region Kalimantan agar semua kegiatan/output kegiatan dapat terealisasi seoptimal mungkin.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BPTP) PONTIANAK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	1. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan	11 Paket Teknologi
		2. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan	7 Jenis
		3. Fasilitasi teknis dukungan teknologi proteksi tanaman perkebunan	12 Bulan
2.	Menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam, dampak perubahan iklim dan gangguan/konflik usaha perkebunan	1. Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan	6 Desa

Kegiatan

1. Dukungan Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

Anggaran

Rp. 11.224.086.000

Pontianak, Januari 2017

Direktur Jenderal,

Kepala Balai,

Ir. Bambang, M.M

Ir. Sajarwadi, M.Agr

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 (BERDASARKAN DARI RKT/RENSTRA)

Unit Kerja : Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak

Program/Kegiatan/Output	Finansial			Output Fisik		
	DIPA	Realisasi	%	RKAKL	% Penyelesaian	Volume
Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan	12.224.086.000	10.096.215.525	89,95			
Dukungan Perlindungan Perkebunan	710.760.000	689.162.800	96,96			
Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (1779003)	710.760.000	689.162.800	96,96	6	100	Desa
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	10.513.326.000	9.407.052.725	89,48			
Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (1781002)	484.046.000	443.106.885	91,54	20	100	Paket Teknologi
Fasilitasi teknis dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (1781003)	679.749.000	613.751.338	90,29	12	100	Bulan
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (1781950)	1.053.340.000	907.345.559	86,14	4	100	Layanan
Layanan Internal (Overhead)(1781951)	755.420.000	710.926.000	94,11	67	100	Layanan
Layanan Perkantoran (1781994)	7.540.771.000	6.731.992.943	89,27	12	100	Bulan
Grand Total	11.224.086.000	10.096.215.526	89,95			

